



**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN KOPERASI MELALUI  
PENGELOLAAN MODAL PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI  
SIPI (KPRI) OBOR KOTA BIMA TAHUN 2016-2019**

**Zainuddin Mukhsin<sup>1</sup>, Wahyuni<sup>2</sup>, Mukhlis<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Pendidikan EKonomi STKIP Bima

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Pendidikan EKonomi STKIP Bima

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Pendidikan EKonomi STKIP Bima

[zainuddinmukhsin77@gmail.com](mailto:zainuddinmukhsin77@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
<b>Keywords:</b> Tingkat Kemandirian Koperasi, Pengelolaan Modal	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian koperasi melalui pengelolaan modal pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil (KPRI) OBOR Kota Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi sebanyak 5 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik dengan menggunakan rumus likuiditas, solvabilitas, rasio Rentabilitas Ekonomi (RE). Dari hasil perhitungan diperoleh hasil yaitu rasio likuiditas pada KPRI OBOR Kota Bima yang menunjukkan tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan harta atau aktiva lancar dan hutang lancar. Tahun 2016 yaitu Rp. 12.676.106.473 (aktiva lancar) dan Rp. 2.814.718.704 (hutang lancar) diperoleh rasio likuiditas sebesar 4,50%, untuk tahun 2017 yaitu Rp. 12.612.400.014 (aktiva lancar) dan Rp. 1.938.480.350 (hutang lancar) diperoleh rasio likuiditas sebesar 6,51%, untuk tahun 2018 yaitu Rp. 13.568.250.172 (aktiva lancar) dan Rp. 1.498.623.500 (hutang lancar) diperoleh rasio likuiditas sebesar 9,05% dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 16.206.213.058 (aktiva lancar) dan Rp. 3.397.270.220 (hutang lancar) diperoleh rasio likuiditas sebesar 4,77%, yang artinya dari rasio likuiditas KPRI OBOR didalam kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansialnya segera harus dipenuhi, dikategorikan sangat baik karena hasil perhitungan rasio likuiditas kurang dari nilai standar yaitu sebesar 125%. Sedangkan rasio solvabilitas yang dicapai KPRI OBOR Kota Bima dengan membandingkan antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Untuk tahun 2016 yaitu Rp. 13.050.928.201 (jumlah aktiva) dan Rp. 2.814.718.704 (jumlah hutang) atau mencapai 4,64%, untuk tahun 2017 yaitu Rp. 12.982.967.677 (jumlah aktiva) dan Rp. 1.938.480.350 (jumlah hutang) atau mencapai 6,70%, untuk tahun 2018 yaitu Rp. 13.962.068.635 (jumlah aktiva) dan Rp. 1.498.623.500 (jumlah hutang) atau mencapai 9,32%, dan untuk tahun 2019 yaitu Rp. 16.530.498.878 (jumlah aktiva) dan Rp. 3.397.270.220 (jumlah hutang) atau mencapai 4,87% yang berarti tingkat kemampuan KPRI OBOR untuk membayar hutang-hutang jangka panjang, dikategorikan sangat efisien. Karena hasil perhitungan rasio solvabilitas lebih kecil dari nilai standar yang ditentukan sebesar 152%. Untuk hasil perhitungan rasio Rentabilitas Ekonomi pada tahun 2016 dengan nilai laba usaha Rp. 672.288.611 dan nilai modal usaha Rp. 9.861.385.769 mendapatkan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) sebesar 0,07%, untuk tahun 2017 dengan nilai laba usaha Rp. 740.823.771 dan nilai modal usaha Rp. 10.673.919.664 mendapatkan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) sebesar 0,07%, untuk tahun 2018 dengan nilai laba usaha Rp. 778.767.543 dan nilai modal usaha Rp. 12.069.626.672 mendapatkan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) sebesar 0,06%, dan untuk tahun 2019 dengan nilai laba usaha Rp. 638.266.519 dan nilai modal usaha Rp. 12.808.943.838 mendapatkan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) sebesar 0,05%.</p>

**PENDAHULUAN**

Pembangunan dibidang ekonomi menjadi titik berat pembangunan jangka panjang karena dalam peningkatan hasil dalam bidang ekonomi akan tersedia sumber

pembangunan yang lebih luas dari pembangunan dibidang sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sasaran pembangunan jangka panjang dalam bidang ekonomi adalah struktur ekonomi yang seimbang dengan titik berat kekuasaan industri yang didukung oleh sektor pembangunan yang kuat, yang akan dicapai pada setiap repelita ke repelita.

Pada era otonomi daerah saat ini dimana pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya sesuai atas desentralisasi yaitu adanya penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, kebijakan pembangunan oleh pemerintah diarahkan untuk meningkatkan, memperluas dan memperbaharui pembangunan di segala bidang terutama dibidang ekonomi, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata dan kesinambungan berdasarkan pancasila. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang mandiri, cerdas, terampil, maju, modern dan kepribadian nasional sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 pasal 41 tahun 1992 mengatakan sumber modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman yang mana modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan hibah sedangkan modal pinjaman berasal dari : anggota, koperasi lain, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dan sumber lain yang sah.

Peranan koperasi sangat penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat secara luas dan merata, dengan menjadikan koperasi sebagai badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta. Namun realisasinya koperasi jarang sekali yang maju., lembaga ini sering berhenti sebagai unit ekonomi kolektif yang kecil dan lambat, bahkan sampai sekarang koperasi masih menghadapi beberapa hambatan seperti partisipasi anggota dan modal koperasi sehingga kemandirian koperasi tidak mampu dicapai.

Sebuah koperasi dapat dikategorikan sebagai koperasi mandiri apabila telah memenuhi kriteria penilaian mandiri dari dinas koperasi dan UKM Republik Indonesia. Salah satu kriteria penilaian koperasi mandiri adalah nisbah (ratio) keuangan dari aspek rentabilitas mencapai nilai minimal 10% (Depkop, 1995:2). Dan apabila Nisbah (Rasio) rentabilitasnya lebih kecil dari 10% maka koperasi tidak dikatakan mandiri. Dalam kaitannya dengan tingkat kemandirian koperasi yang lebih diutamakan adalah rentabilitas modal sendiri.

Untuk dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan koperasi menjadi badan usaha yang mandiri, maka koperasi memerlukan pemenuhan modal. Modal secara klasik mempunyai pengertian sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut dimana modal tersebut dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Jadi modal merupakan salah satu tolak ukur kemandirian koperasi disamping kokohnya loyalitas dan solidaritas anggota koperasi secara sukarela, baik dalam bentuk simpanan transaksi-transaksi maupun pemanfaatan jasa pelayanan koperasi secara optimal.

Modal koperasi dapat dikelola semaksimal mungkin sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan pada tahun buku yang sedang berjalan. Modal yang dikelola oleh kopersi adalah dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Dalam undang-undang no.25

tahun 1992 ayat 41 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dari anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan dan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah (Panji, 1997 : 226). Adapun syarat-syarat yang dipenuhi dalam kemandirian koperasi antara lain adalah : 1) keanggotaan bersifat terbuka, artinya setiap anggota koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkungan usaha koperasi, 2) pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis, 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, 4) pengelolaan modal artinya semua upaya dan tindakan mengatur dan memanfaatkan/menggunakan sumber daya dalam hal ini uang secara optimal, selektif dan efektif untuk menciptakan kondisi perputaran modal dapat berlangsung dengan baik (Amin, 1995: 15). Namun kemandirian koperasi dapat dilihat melalui pengelolaan modal yang dapat dilakukan oleh koperasi secara efektif dan efisien.

Modal Koperasi Pegawai Negeri Sipil (KPRI) OBOR Kota Bima berasal dari anggota dan bukan anggota yang tidak mengikat, modal dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, simpanan wajib pinjam dana resiko dan simpanan wajib khusus. Dengan ditetapkan jumlah simpanan pokok peranggota adalah Rp. 10.000, simpanan wajib peranggota perbulan Rp. 20.000 dan simpanan wajib khusus para anggota sebesar Rp. 1000 perbulan. Sedangkan simpanan wajib pinjaman dana resiko dipotong masing-masing 1% dari jumlah pinjaman yang diterima anggota. Jumlah modal sendiri pada akhir tahun 2019 sebesar Rp. 1.610.759.342, selain itu KPRI OBOR Kota Bima memperoleh modal yang berasal dari luar koperasi yaitu berupa Hutang Bank dan Hutang Usaha. Jumlah hutang bank akhir tahun 2018 sebesar Rp. 1.248.623.500 dan jumlah hutang usaha sebesar Rp. 250.000.000, pada tahun 2019 KPRI OBOR Kota Bima mendapat pinjaman dari Bank BKE Jakarta sebesar Rp. 2.091.879.482.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis studi kasus. Sumber data meliputi data primer dan data sekunde. Data Primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. Sementara data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, dokumen dan jurnal di KPRI OBOR. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Metode observasi digunakan dengan mengamati langsung aktivitas koperasi serta mencatat data-data keadaan koperasi yaitu mencatat jumlah modal, sumber pemenuhan modal, pengeluaran atau penggunaannya, besarnya rugi laba dan potensi wilayah yaitu luasnya wilayah operasional, jumlah penduduk serta jumlah anggota koperasi. Sementara studi dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa neraca perhitungan hasil usaha dalam informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan data keuangan untuk mendapatkan informasi pengelolaan modal kerja melalui neraca, laporan rugi laba, dan laporan Sisa Hasil Usaha. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari laporan perhitungan hasil usaha (PHU) diperoleh nilai sisa hasil usaha dari tahun 2016-2019, nilai SHU kemudian dibandingkan dengan nilai modal sendiri yang diperoleh dari data pada neraca dari tahun 2016-2019. Dari neraca diperoleh jumlah modal usaha koperasi yang terletak pada neraca sebelah kredit yaitu pada jumlah kekayaan bersih, namun untuk perhitungan rasio modal sendiri nilai modal usaha dikurangi terlebih dahulu dengan modal donasi (modal yang berasal dari luar koperasi) sehingga menjadi modal sendiri.

Untuk mendapatkan modal usaha sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Sedangkan untuk mendapatkan current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%.

Tabel 4.1.  
Tingkat Kemandirian Koperasi Dari Aspek Likuiditas

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Rasio Likuiditas
2016	12.676.106.473	2.814.718.704	450,35%
2017	12.612.400.014	1.938.480.350	650,63%
2018	13.568.250.172	1.498.623.500	905,38%
2019	16.206.213.058	3.397.270.220	477,04%

Sumber data : KPRI Obor (diolah), 2019.

Dari tabel di atas memperlihatkan ada peningkatan tiap tahunnya untuk aktiva lancar sedangkan untuk hutang lancar berfluktuasi. Untuk tahun 2016 aktiva lancar Rp. 12.676.106.473 hutang lancar Rp. 2.814.718.704 dan rasio likuiditas sebesar 450,35%. Untuk tahun 2017 aktiva lancar Rp. 12.612.400.014 hutang lancar Rp. 1.938.480.350 dan rasio likuiditas sebesar 650,63%. Untuk tahun 2018 aktiva lancar Rp. 13.568.250.172 hutang lancar Rp. 1.498.623.500 dan rasio likuiditas sebesar 905,38%. Untuk tahun 2019 aktiva lancar Rp. 16.206.213.058 hutang lancar Rp. 3.397.270.220 dan rasio likuiditas sebesar 477,04%.

Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan teknik analisis statistik melalui rumus rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE). dari rasio tersebut dapat diketahui tingkat kemandirian koperasi melalui pengelolaan modal yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela guna membiayai usaha dan pengembangan koperasi.

### I. Rasio Likuiditas

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2016 &= \frac{12.676.106.473}{2.814.718.704} \times 100\% \\ &= 450,35\% \end{aligned}$$

$$12.612.400.014$$

$$\begin{aligned}
 2017 &= \frac{1.938.480.350}{13.568.250.172} \times 100\% \\
 &= 650,63\% \\
 2018 &= \frac{1.498.623.500}{16.206.213.058} \times 100\% \\
 &= 905,38\% \\
 2019 &= \frac{3.397.270.220}{16.206.213.058} \times 100\% \\
 &= 477,04\%
 \end{aligned}$$

II. Rasio solvabilitas

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Jumlah aktiva/kekayaan}}{\text{Jumlah hutang}} \times 100\%$$

Tabel 4.2.  
Tingkat Kemandirian Koperasi Dari Aspek Solvabilitas

Tahun	Jumlah Aktiva	Jumlah Hutang	Rasio Solvabilitas
2016	13.050.928.201	2.814.718.704	463,67%
2017	12.982.967.677	1.938.480.350	669,75%
2018	13.962.068.635	1.498.623.500	931,66%
2019	16.530.498.878	3.397.270.220	486,58%

Sumber data : KPRI Obor (diolah), 2019.

Dari tabel di atas terlihat peningkatan tiap tahunnya untuk jumlah aktiva mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk tahun 2016 jumlah aktiva Rp. 13.050.928.201, jumlah hutang Rp. 2.814.718.704 dan rasio solvabilitas sebesar 463,67%. Untuk tahun 2017 jumlah aktiva Rp. 12.982.967.677, jumlah hutang Rp. 1.938.480.350 dan rasio solvabilitas sebesar 669,75%. Untuk tahun 2018 jumlah aktiva Rp. 13.962.068.635, jumlah hutang Rp. 1.498.623.500 dan rasio solvabilitas sebesar 931,66%. Untuk tahun 2019 jumlah aktiva Rp. 16.530.498.878, jumlah hutang Rp. 3.397.270.220 dan rasio solvabilitas sebesar 486,58%.

Dari hasil perhitungan rumus rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tersebut, selanjutnya akan dihitung nilai rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) yang selanjutnya dibandingkan dengan rasio rentabilitas ekonomi standar yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Republik Indonesia yaitu mencapai nilai minimal 10% (Depkop, 1995 : 2). Untuk memudahkan perhitungan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) berikut dilampirkan data SHU yang merupakan laba usaha dari Perhitungan Hasil Usaha (KPRI) OBOR Kota Bima dari tahun 2016-2019 berikut ini :

Tabel 4.3  
Nilai Laba Usaha atau (KPRI) OBOR Kota Bima Tahun 2016-2019

No	Tahun	Laba Usaha / SHU (Rp)
----	-------	-----------------------

1.	2016	Rp. 672.288.611
2.	2017	Rp. 740.823.771
3.	2018	Rp. 778.767.543
4.	2019	Rp. 638.266.519

Sumber : Data diolah, 2019.

Selanjutnya untuk mengetahui nilai modal usaha yaitu dengan memperhatikan Neraca KPRI OBOR Kota Bima tahun 2016-2019, dimana nilai modal usaha diperoleh dari nilai aktiva lancar dikurangi hutang lancar.

Tabel 4.4.

Nilai Modal Usaha KPRI OBOR Kota Bima Tahun 2016-2019

No	Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Modal Usaha	Rasio Rentabilitas
1.	2016	12.676.106.473	2.814.718.704	Rp. 9.861.385.769	0,07%
2.	2017	12.612.400.014	1.938.480.350	Rp. 10.673.919.664	0,07%
3.	2018	13.568.250.172	1.498.623.500	Rp. 12.069.626.672	0,06%
4.	2019	16.206.213.058	3.397.270.220	Rp. 12.808.943.838	0,05%

Sumber data : KPRI Obor (diolah), 2019.

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 aktiva lancar yang dimiliki oleh Koperasi KPRI OBOR Kota Bima adalah sebesar Rp. 12.676.106.473 dengan jumlah hutang lancar sebanyak Rp. 2.814.718.704. Jumlah modal usaha yang dimiliki pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 9.861.385.769 dengan rasio Rentabilitas sebesar 0,07%. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan Koperasi KPRI OBOR Kota Bima untuk melunasi hutang jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar cukup tinggi. Tahun 2017 aktiva lancar yang dimiliki oleh Koperasi KPRI OBOR Kota Bima adalah sebesar Rp. 12.612.400.014 dengan jumlah hutang lancar sebanyak Rp. 1.938.480.350. Jumlah modal usaha yang dimiliki pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 10.673.919.664 dengan rasio Rentabilitas sebesar 0,07%. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan Koperasi KPRI OBOR Kota Bima untuk melunasi hutang jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar cukup tinggi. Tahun 2018 aktiva lancar yang dimiliki oleh Koperasi KPRI OBOR Kota Bima adalah sebesar Rp. 13.568.250.172 dengan jumlah hutang lancar sebanyak Rp. 1.498.623.500. Jumlah modal usaha yang dimiliki pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.069.626.672 dengan rasio Rentabilitas sebesar 0,06%. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan Koperasi KPRI OBOR Kota Bima untuk melunasi hutang jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar cukup tinggi. Tahun 2019 aktiva lancar yang dimiliki oleh Koperasi KPRI OBOR Kota Bima adalah sebesar Rp. 16.206.213.058 dengan jumlah hutang lancar sebanyak Rp. 3.397.270.220. Jumlah modal usaha yang dimiliki pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 12.808.943.838 dengan rasio Rentabilitas sebesar 0,05%. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan Koperasi KPRI OBOR Kota Bima untuk melunasi hutang jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar cukup tinggi.

Selanjutnya dapat dihitung rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) pada Koperasi KPRI OBOR Kota Bima dari tahun 2016-2019 sebagai berikut :

$$RE = \frac{\text{Laba Usaha / SHU}}{\text{Modal Usaha}} \times 100\%$$

Berikut ditampilkan tabel rekapitulasi laba usaha, modal usaha dan rentabilitas ekonomi sebagai berikut:

Tabel 4.5.  
Rekapitulasi Laba Usaha, Modal Usaha dan Rentabilitas Ekonomi

Tahun	Laba Usaha	Modal Usaha	Rentabilitas Ekonomi
2016	Rp. 672.288.611	Rp. 9.861.385.769	6,82%
2017	Rp. 740.823.771	Rp. 10.673.919.664	6,94%
2018	Rp. 778.767.543	Rp. 12.069.626.672	6,45%
2019	Rp. 638.266.519	Rp. 12.808.943.838	4,98%

Sumber data : KPRI Obor (diolah), 2019.

Dari hasil perhitungan rasio likuiditas diperoleh dari nilai rasio likuiditas KPRI OBOR Kota Bima pada tahun 2016 sebesar 4,50%, tahun 2017 sebesar 6,51%, tahun 2018 sebesar 9,05%, dan tahun 2019 sebesar 4,77%. Selanjutnya hasil perhitungan rasio solvabilitas diperoleh yaitu tahun 2016 sebesar 4,64%, tahun 2017 sebesar 6,70%, tahun 2018 sebesar 9,32%, dan tahun 2019 sebesar 4,87%. dan dari hasil perhitungan rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) tersebut diperoleh nilai rasio Rentabilitas Ekonomi KPRI OBOR Kota Bima pada tahun 2016 sebesar 6,82%, Rasio RE pada tahun 2017 sebesar 6,94%, Rasio RE pada tahun 2018 sebesar 6,45%, dan Rasio RE pada tahun 2019 sebesar 4,98%

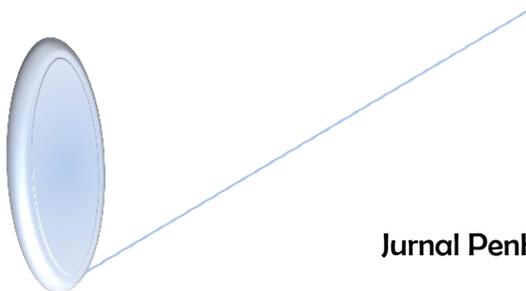
Nilai rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) KPRI OBOR Kota Bima tersebut apa bila dibandingkan dengan nilai rentabilitas standar yaitu sebesar 10%, maka nilai rasio Rentabilitas Ekonomi KPRI OBOR Kota Bima lebih kecil dari pada nilai rentabilitas ekonomi standar, yang artinya tingkat kemandirian koperasi KPRI OBOR Kota Bima ada melalui pengelolaan modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

## KESIMPULAN

Dengan melalui beberapa prosedur penelitian yang disajikan pada bab demi bab, dapat disimpulkan bahwa ada tingkat kemandirian Koperasi KPRI OBOR Kota Bima melalui pengelolaan modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio likuiditas KPRI OBOR Kota Bima yaitu pada tahun 2016 sebesar 450,35%, tahun 2017 sebesar 650,63%, pada tahun 2018 sebesar 905,38%, dan pada tahun 2019 sebesar 477,04%, Rasio solvabilitas yaitu pada tahun 2016 sebesar 463,67%, tahun 2017 sebesar 669,75%, pada tahun 2018 sebesar 931,66%, dan pada tahun 2019 sebesar 486,58%. Rasio Rentabilitas Ekonomi (RE) KPRI OBOR Kota Bima yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,07%, tahun 2017 sebesar 0,07%, pada tahun 2018 sebesar 0,06%, dan pada tahun 2019 sebesar 0,05% yang lebih kecil dari rasio Rentabilitas (RE) standar yaitu sebesar 10%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Widjaya. 1995. *Akutansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.  
Anoraga, Pandji dkk. 1997. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.  
Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.



**Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 3, No. 2 (2020)**

- Bawsir, Refrisond. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Direktorat Jendral Pembinaan Koperasi Perkotaan. 1995/1996. *Pedoman Dan Petunjuk Teknis (Sistim Penilaian Koperasi Karyawan Mandiri)*. Jakarta: Depertemen Koperasi Dan Pembinaan Usaha Kecil.
- Edilius, dkk, 1997. *Pengantar Ekonomi Erusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartasapoetra g, dkk. 1985. *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munawir. 1983. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mariani. 2003. *Dikta Manajemen Koperasi*. Bima: STKIP Bima.
- Riyanto, Bambang. 1997. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Sariono, dkk, 2007. *Manusia Dan Perilaku Ekonomi*. Ganeca Exact.
- Teguh. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Jakarta: Citra Umbara.
- Wirasasmita, dkk, 1999. *Manajemen Koperasi*. Semarang: Plonir Jaya.
- Widiyanti, 1992. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.